

RINGKASAN

Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menjalankan suatu kebijakan, yang ditujukan kepada kelompok sasaran, untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Program-program pembangunan yang dilakukan selama ini sebagian besar selalu memperhatikan kepada upaya pengentasan kemiskinan. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau sering disebut dengan *Social Safety Net* merupakan program yang dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kurang optimalnya implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dan informasi dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konsep keberhasilan pelaksanaan program Jaring pengaman Sosial (JPS) melalui beberapa kategori menurut Khaerul Umam Noer dan Ni Loh Gusti Madewanti diantaranya : pelaksanaan program, tim pendamping lapangan dan kritik terhadap kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat mengurangi pengeluaran. Namun pendistribusiannya masih belum menyesuaikan dengan panduan teknis yang telah tersedia. Pelaksana program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terdiri dari Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan yang dibantu oleh TKSK, dan Pelaksanaan Distribusi BPNT tingkat desa yang dibantu oleh RT, RW, serta melibatkan bank penyalur yaitu Bank Mandiri. Penentuan sasaran kebijakan berdasarkan hasil musyawarah desa (musdes)/musyawarah kelurahan (muskel) yang dilakukan secara *bottom-up*. Penentuan komoditas bahan pangan yang akan diterima oleh setiap KPM juga sudah melibatkan Keluarga Penerima Manfaat. Ketepatan sasaran dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini belum tepat sasaran. Peran dari fasilitator program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu untuk pendampingan terhadap kelompok sasaran dan juga mendampingi para pelaksana pendistribusian bahan pangan. Sebagai fasilitator harus memiliki pengetahuan terkait program guna memahami karakteristik dari program. namun fasilitator belum bisa menerapkan perannya, hal ini karena fasilitator belum mampu memecahkan masalah dalam pelaksanaan program karena kurangnya koordinasi. Kelebihan program memberi kemudahan dalam mengontrol, memantau penyaluran dan mengurangi penyimpanan. KPM mendapatkan kualitas beras yang baik KPM dapat memilih dan membeli bahan pangan. dapat menghemat waktu, dan prosesnya cepat membuat warga antusias. Hambatan yang

terjadi dalam pelaksanaan program lokasi e-Warong yang terlalu jauh dengan tempat tinggal Keluarga Penerima Manfaat, kualitas sembako yang dibagikan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kemensos, kurang optimalnya aplikasi SIKS-NG sehingga mengakibatkan data menjadi keliru, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman program, masih terdapat rekening kosong, dan juga kurangnya pengawasan.

Kata kunci : Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), implementasi, kebijakan, kemiskinan.



SUMMARY

Policy implementation is an activity to carry out a policy, which is shown to the target group, to achieve policy objectives. Most of the development programs that have been carried out so far have always paid attention to poverty alleviation efforts. The Social Safety Net Program (JPS) or often referred to as the Social Safety Net is a program designed to help the poor who are affected by the economic crisis and is carried out through rescue and recovery stages to return to normal conditions. The policy made by the central government to overcome the problem of poverty is the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program.

The purpose of this study was to determine the cause of the less than optimal implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Ciamis Regency. This study uses descriptive qualitative research methods. The data and information in this study were collected by means of interviews, observation and documentation. The informant selection technique used purposive sampling and snowball sampling. The theory used in this study refers to the concept of successful implementation of the Social Safety Net (JPS) program through several categories according to Khaerul Umam Noer and Ni Loh Gusti Madewanti including : program implementation, field assistance teams and criticism of policies.

The results of the study indicate that the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program can provide benefits, meet the needs of daily life and can reduce expenses. However, the distribution is still not in accordance with the available technical guidelines. Implementers of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program consist of the District Level Coordination Team, the District Level Coordination Team assisted by TKSK, and the Village Level BPNT Distribution Implementation assisted by RT, RW, and involving the channeling bank, namely Bank Mandiri. Determination of policy targets based on the results of village deliberations (musdes)/sub-district deliberations (muskel) conducted on a bottom-up basis. Determination of food commodities that will be received by each KPM has also involved Beneficiary Families. The target accuracy in the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program is not yet on target. The target accuracy in the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program is not yet on target. The role of the facilitator of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program is to assist the target group and also assist the implementers of food distribution. As a facilitator, you must have knowledge related to the program in order to understand the characteristics of the program. but the facilitator has not been able to implement his role, this is because the facilitator has not been able to solve problems in program implementation due to lack of coordination. The advantages of the program make it easy to control, monitor dispensing and reduce storage. KPM get good quality rice KPM can choose and buy food, can save time, and the process is fast making people enthusiastic. Obstacles that occur in the implementation of the e-Warong location program which is too far from the residence of the Beneficiary Family, the quality of the food items distributed does not match the criteria set by the Ministry of Social Affairs, less than optimal

SIKS-NG application, resulting in incorrect data, lack of socialization to the community regarding program understanding, there are still empty accounts, and lack of supervision.

Keywords : Non-Cash Food Assistance (BPNT), implementation, policy, poverty.

